BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan dengan keunikan, potensi, sekaligus keterbatasan yang berbeda. Perbedaan ini menjadi bagian dari kehidupan yang mendorong adanya sikap saling menghormati, memahami, dan saling menolong. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam akses terhadap berbagai layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Upaya penting untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas adalah dengan mengembangkan keterampilan berwirausaha. Aktivitas ini bukan sekadar cara memperoleh penghasilan, tetapi juga sarana pemberdayaan yang menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan potensi diri. Melalui kegiatan kewirausahaan, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian serta memperkuat peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

Individu dengan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang. Keterbatasan ini sering kali menghadirkan berbagai rintangan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh lingkungan yang belum sepenuhnya dapat diakses dan inklusif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang, yang ketika berinteraksi dengan lingkungannya dapat menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lain. lingkungannya, dapat mengalami rintangan dan masalah untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Definisi itu menekankan bahwa penyediaan akses yang setara dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kehidupan yang inklusif dan adil.

Pandangan negatif dan stigma yang masih ada di masyarakat menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan potensi, dan mewujudkan cita-cita mereka. Persepsi yang menganggap penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mencapai keberhasilan di masa depan dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kesempatan mereka untuk berkembang. Rasa ragu terhadap kemampuan penyandang disabilitas tidak hanya datang dari masyarakat luas, tetapi juga kadang muncul dari keluarga sendiri, termasuk orang tua yang memiliki anak dengan kondisi disabilitas. Kondisi

tersebut dapat berdampak pada rendahnya dukungan yang diberikan terhadap pengembangan potensi, pendidikan, maupun kemandirian anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kemampuan serta hak-hak penyandang disabilitas agar mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk merencanakan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Memberikan akses pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas adalah langkah krusial untuk membangun lingkungan inklusif sekaligus mengurangi diskriminasi, stigma, maupun perundungan yang masih mereka hadapi. Akses pendidikan yang setara tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk mengembangkan potensi serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Penyandang disabilitas pada umumnya menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi proses belajar dan kehidupan sehari-hari, seperti hambatan dalam komunikasi, keterampilan sosial, kemampuan merawat diri, fungsi intelektual, serta kemampuan melakukan aktivitas tertentu. Meskipun demikian, berbagai keterbatasan tersebut bukanlah penghalang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka, penyandang disabilitas dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian serta kualitas hidupnya.

Sampai sekarang, kelompok disabilitas masih tergolong tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021 yang mengacu pada data Susenas 2020,

jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,22 juta jiwa atau setara dengan 8,5 persen dari total populasi nasional. Sementara itu, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan dasar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk non-disabilitas. Kesenjangan tersebut terlihat pada akses terhadap program wajib belajar sembilan tahun yang memiliki tingkat ketimpangan hingga 8,6 kali lebih tinggi, sedangkan pada aspek kesempatan kerja ketimpangannya mencapai 5,4 kali dibandingkan kelompok non-disabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat secara luas.

Penyandang disabilitas merupakan fenomena yang terjadi pada manusia yang memiliki kekurangan dalam haknya sebagai manusia. Fenomena yang dimaksud disini adalah dimana banyaknya para penyandang disabilitas yang memiliki tekanan dari lingkungan tempat tinggalnya tanpa terkecuali dari orangtuanya sendiri. Banyak anak-anak penyandang disabilitas yang dianggap tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki kemampuan di dalam dirinya sendiri. Kurangnya dukungan dan motivasi yang diberikan kepada anak-anak penyandang disabilitas baik dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan tercatat sebanyak 248.068 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas tersebar pada berbagai kelompok usia lanjut. Secara rinci,

penyandang disabilitas pada rentang usia 60–64 tahun berjumlah 93.267 jiwa, usia 65–69 tahun sebanyak 69.596 jiwa, usia 70–74 tahun mencapai 44.007 jiwa, sedangkan kelompok usia 75 tahun ke atas berjumlah 41.198 jiwa (BPS Kota Medan). Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan cukup tinggi, sehingga pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian serius dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta program pemberdayaan yang sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas tunanetra sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pekerjaan formal. Keterbatasan akses terhadap dunia kerja, rendahnya penerimaan masyarakat, serta minimnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka menyebabkan tingkat pengangguran pada kelompok disabilitas relatif tinggi. Oleh karena itu, keterampilan berwirausaha menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu penyandang tunanetra untuk mencapai kemandirian ekonomi.

SLB-A, sebagai sekolah khusus untuk tunanetra, berperan penting dalam membekali siswa agar siap menghadapi kehidupan setelah lulus. Selain memberikan pembelajaran akademik, SLB-A juga dituntut untuk membekali peserta didik dengan keterampilan vokasional dan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan mereka. Melalui pelatihan keterampilan wirausaha, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, serta memiliki bekal untuk menciptakan peluang usaha secara mandiri

Dalam aspek perlindungan sosial, akses penyandang disabilitas terhadap berbagai program bantuan pemerintah masih relatif terbatas. Berdasarkan data dari

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2021), hanya sekitar 1,07 juta penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau sekitar 5 persen dari keseluruhan penerima manfaat program perlindungan sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh sistem perlindungan sosial yang tersedia. Selain itu, jumlah penerima manfaat maupun cakupan program perlindungan sosial yang secara khusus ditujukan bagi penyandang disabilitas masih tergolong terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kelompok ini. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya perluasan jangkauan program, peningkatan akurasi pendataan, serta penguatan kebijakan yang lebih inklusif agar penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih merata terhadap berbagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data yang ada, seharusnya Pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada para penyandang disabilitas, namun dari yang dapat kita lihat bahwa banyaknya para penyandang disabilitas yang menjadi gelandangan ataupun mengemis di pinggir jalan dikarenakan kurangnya rasa tingkat keperduliaan masyarakat di Indonesia sekarang ini.

Pelatihan wirausaha adalah bentuk pembelajaran yang dirancang untuk menambah pengetahuan, membentuk sikap, serta mengasah keterampilan seseorang dalam mengelola usaha. Pelatihan tersebut dapat berupa keterampilan produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan, maupun pemanfaatan teknologi digital dalam berwirausaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dapat meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian

ekonomi penyandang disabilitas apabila dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa saat ini penyandang disabilitas perlu diperhatikan mengingat adanya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara adil dan setara. Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar hukum dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya serta berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara dengan hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut melekat pada setiap individu dan tidak boleh dibatasi, dihalangi, dikurangi, ataupun dihapus oleh siapa pun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena itu pelatihan keterampilan wirausaha yang dibuat untuk penyandang disabilitas sangatlah diperlukan untuk dapat memberikan hak untuk masa depan bagi penyandang disabilitas terutama pada penyandang disabilitas

tunanetra. Dalam hal ini, sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis sekaligus untuk melakukan penelitian. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Analisis Pelatihan Keterampilan Wirausaha Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di SLB-A Karya Murni Medan"**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelatihan keterampilan wirausaha bagi penyandang disabilitas tunanetra di SLB-A Karya Murni Medan, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan faktor pendukung dan penghambat yang sesuai dengan judul "Analisis Pelatihan Keterampilan Wirausaha Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di SLB-A Karya Murni Medan".

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas di SLB-A Karya Murni Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas di panti asuhan dalam mengembangkan keterampilan dan bakat-bakat yang mereka miliki?
3. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelatihan oleh SLB-A Karya Murni Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan

pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas di SLB-A Karya Murni. Secara khusus, maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pelatihan bagi penyandang disabilitas di SLB-A Karya Murni Medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas di SLB-A dalam mengembangkan keterampilan dan bakat-bakat yang mereka miliki.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelatihan oleh pihak SLB-A Karya Murni Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Pendidikan Masyarakat yang berkaitan dengan pelatihan serta pemberdayaan kelompok disabilitas. Selain berfungsi sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Masyarakat, penelitian ini juga diharapkan memperkaya wawasan dan pemahaman peneliti mengenai praktik pelatihan bagi penyandang disabilitas. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan rujukan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian ilmiah yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan penyandang

disabilitas. Temuan penelitian dapat dijadikan masukan penting dalam mencari solusi atas beragam persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pelatihan bagi kelompok disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi dan rujukan bagi lembaga, praktisi, peneliti, maupun pihak lain yang membutuhkan data serta kajian mengenai pelatihan keterampilan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung perbaikan sekaligus pengembangan program pelatihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY